

JURNAL

**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA
MALANG**

(STUDI DIMALANG CORRUPTION WATCH)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGA ARIO PRASETYO

105010100111112



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DIKOTA MALANG
(Studi di Malang Corruption Watch)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Angga Ario Prasetyo

b. NIM : 105010100111112

c. Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Jangka waktu penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

Ardi Ferdian, SH., M.Kn
NIP. 198309302009121003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MALANG

(Studi di Malang Corruption Watch)

Angga Ario Prasetyo, Yuliati, S.H., LL.M, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ryo.angga@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang. 30. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peran serta yang dilakukan MCW dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penanganan terhadap 14 kasus tindak pidana korupsi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, serta pencarian kasus melalui aduan masyarakat dan inisiatif pengkajian data. Kendala yang dihadapi MCW dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang adalah (1) kendala internal yang dihadapi MCW adalah pendanaan lembaga yang masih swadaya serta keterbatasan kualitas dan kuantitas anggota MCW yang tidak sebanding dengan wilayah kerjanya, dan (2) kendala eksternal yang dihadapi MCW adalah tertutupnya akses informasi dan publikasi lembaga publik, kurangnya respon dari aparat penegak hukum serta ancaman dan intimidasi dari berbagai macam pihak. Upaya MCW dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang dilakukan dengan dua upaya. Upaya penanggulangan yang pertama yakni dengan upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan MCW sebelum terjadi tindak pidana korupsi. Upaya yang kedua dengan upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi untuk membantu aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Peran Serta, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penanggulangan, Tindak Pidana Korupsi.

THE ROLE OF NON-GOVERNMENT ORGANISATION PREVENTION EFFORTS IN CORRUPTION MALANG

(Studies in Malang Corruption Watch)

Ario Anga Prasetyo, Yuliati, SH, LL.M, Ardi Ferdian, SH, M.Kn
Faculty of Law, University of Brawijaya
Email: ryo.angga@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research are 1). To determine and analyze the role of non-governmental organizations Malang Corruption Watch the reduction of corruption in the city of Malang. 2). To find and analyze kendala lembaga nongovernmental Malang Corruption Watch to efforts combating corruption in Malang. 3) To determine the efforts of non-governmental organizations Malang Corruption Watch in overcoming obstacles combating corruption in the city of Malang. This study uses empirical jurisdiction with criminological juridical approach. Primary and secondary data obtained were analyzed using descriptive analysis. From the results of research using the above method, the authors obtained answers to existing problems that made MCW participation in the response to corruption is to make the handling of the 14 cases of corruption during the period of last three years, as well as search through the case and the public complaints initiative pengkajian data. Constraints faced by MCW in combating corruption in Malang are (1) internal constraints faced by MCW is still self-financing institutions as well as the limitations of the quality and quantity of MCW member who is not proportional to its jurisdiction, and (2) external constraints faced by MCW is the closing of access to information and publication of public institutions, the lack of response from law enforcement agencies as well as the threat and intimidation from various parties. MCW efforts in combating corruption in Malang done in two attempts. The first efforts of combating that the preventive measures are undertaken MCW prevention of corruption before it occurs. The second effort with a repressive efforts combating efforts undertaken following the alleged cases of corruption to assist law enforcement officials in combating corruption.

Keywords: Participation, Community, NGOs, Poverty, Corruption.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi¹. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sudah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara².

Pemerintah dalam memaksimalkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk menjalankan isi peraturan Undang-undang tersebut sebagai bentuk kontrol agar angka tindak pidana korupsi dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat mewujudkan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terdapat tiga unsur elemen yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum itu sendiri karena berkaitan erat dengan adanya suatu sistem yang tidak dapat saling dipisahkan, di antaranya adalah struktur, substansi dan budaya. Di dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tentunya tidak dapat dilepaskan dari tiga hal tersebut. Salah satu elemen yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah adalah budaya atau *culture* yang dalam hal ini adalah peran serta masyarakat

¹ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Gravika, Jakarta, 2005, hlm 24.

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 1.

dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi³,

Sebagaimana dalam pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa : “Masyarakat dapat berperan serta mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Hal ini terwujud melalui adanya peran serta masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuk oleh beberapa elemen masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pelaporan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran serta pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai tindak pidana korupsi”. Berkaitan dengan

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia**, Badan Penerbit Undip, Semarang, Hlm. 61.

hal tersebut masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memberikan perannya terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat peraturan tersebut.

Di Kota Malang tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang menjadi perhatian utama baik dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat di Kota Malang. Korupsi yang terjadi di kota malang sudah mencapai tahap yang sangat mekhawatirkan sehingga perlu adanya kontrol baik dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu unsur dalam penegakan hukum. Sebagai perwujudan masyarakat yang demokrasi dalam kaitanya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kota Malang, masyarakat telah membentuk berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga sosial yang independent yang juga mempunyai peran dalam pemberantasan dan penanggulangan masalah korupsi.

Malang Corruption Watch yang digagas sebagai lembaga publik yang independen dalam peranannya telah berpartisipasi dalam pengungkapan beberapa kasus yang diantaranya adalah pengungkapan kasus DPRD Kota Malang periode 1999-2004 yang dilakukan oleh Dra Sri Rahayu senilai Rp 21 M di DPRD Kota Malang. selain itu untuk saat ini Malang Corruption Watch juga sedang melakukan analisa secara mendalam terhadap beberapa instansi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) yang bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan jembatan

Kedungkandang, dinas perhubungan (DISHUB) yang tersangkut dugaan *mark-up* pengadaan paku jalan, dinas kesehatan yang diduga melakukan praktek curang dengan tim appraisal untuk memark-up pengadaan lahan RSUD serta Dinas Pendidikan yang menjual buku panduan kurikulum 2013⁴.

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Malang Corruption Watch tentunya mengalami berbagai macam kendala dan hambatan yang dialami akan tetapi malang corruption watch juga melakukan upaya dan pengembangan terkait dengan masalah dan kendala yang dihadapi guna memaksimalkan perannya sebagai salah satu elemen bagian dari penegakan hukum terkait masalah penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang ada di kota Malang. Dengan demikian hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Malang.

B. Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta lembaga swadaya masyarakat “ Malang Corruption Watch” terhadap upaya pencegahan korupsi di Kota Malang?

⁴ Berdasarkan **hasil pra-survey** yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Akmal Adi Cahya, Ketua sekretariat Malang Corruption Watch (11 Maret 2014)

2. Apa kendala lembaga swadaya masyarakat “Malang Corruption Watch” terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Malang ?
3. Bagaimana upaya lembaga swadaya masyarakat “Malang Corruption Watch” dalam mengatasi kendala pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Malang ?

C. Pembahasan

1. Metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis kriminologis*. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

2. Hasil penelitian

A. Realita Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Malang

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru saja terjadi, salah satu kota yang berpotensi dan sudah banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi adalah Kota Malang. Korupsi di kota Malang sudah sangat mengawatirkan dimana sudah banyak kasus maupun dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan lembaga swasta dan pemerintah baik dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus ataupun dugaan tindak pidana korupsi dari kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014, sebagai berikut ini:

Tabel 4.1

**Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani MCW dalam
Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir (2012-2014) di Wilayah**

Kota Malang:

No Aduan	Tgl penerima an aduan	Jenis aduan	Pengadu	Perkembangan Kasus	keterangan
001/UPA/MCW/XII/2012	24 Desember 2011	Kasus Lingkungan, Penggunaan Hak atas air	Warga Bumiaji	Proses Litigasi di PN Kota Malang	Proses pendampingan oleh tim ADVOKAT
002/UPA/MCW/X/2012	2012	DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mark Up	HMI UIN	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang	Proses Monitoring
003/UPA/MCW/V/2013	2013	DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Penggandaan Buku	Pak Joko VEDC	Pengumpulan alat bukti	Proses Investigasi
004/UPA/MCW/IV/2014	26 April 2014	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan RSJ	Anton Herwant	Kajian	_____
005/UPA/MCW/IV/2014	April 2014	Sengketa Tanah Wakaf Kedungkandang Kota Malang	Pak Hendy	Proses Advokasi	Proses Advokasi
006/UPA/MCW/IV/2014	April 2014	Kasus Pembangunan RUSUNAWA Universitas Brawijaya	Lethisa & Bambang	Proses Advokasi	Perkara privat sudah ada putusan pengadilan negeri & Akan diadakan pembahasan ulang perihal gugatan class action

007/UPA/ MCW/V/2 014	31 Mei 2014	Sengketa Tanah Bengkok di Bumiaji Kota Batu	Darmadji	DITOLAK	DITOLAK
008/UPA/ MCW/V/2 014	Mei 2014	Penyalahgunaan wewenang Perizinan tambang pasir besi	Mantan Perhutani Kab. Malang	Pengumpulan alat bukti	Proses Investigasi
009/UPA/ MCW/V/2 014	Mei 2014	Dugaan Tindak pidana Korupsi Pembangunan Stadion	Inisiatif	Pengumpulan alat bukti	Proses Invesitgasi
010/UPA/ MCW/V/2 014	17 Mei 2014	Kasus Buruh	Buruh Kota Batu	Tidak ada tindak lanjut	Tidak ada tindak lanjut

Sumber: Data skunder, diolah 2014

Dari data diatas dapat dilihat daftar kasus yang ditangani oleh LSM MCW diatas terdapat 14 kasus yag ditangani selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kasus-kasus yang telah masuk dalam MCW tentunya memerlukan penanganan yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya dan juga mengalami perkembangan berbeda di tiap kasus.

MCW juga menangani beberapa aduan terkait permasalahan dugaan pungli di dalam sektor pendidikan. Berdasarkan riset MCW tahun 2011 tentang study pemetaan modus, aktor dan potensi kerugian di Kota Malang ditemukan praktek korupsi marak dilakukan di sektor pendidikan. Di tahun

2010 korupsi terjadi setidaknya 6 kasus korupsi akan tetapi pada tahun 2011 menjadi 31 kasus korupsi.⁵

Berikut adalah kasus terbaru yang ditangani oleh MCW mengenai hasil rekapitulasi data aduan penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa;

Tabel 4.2.

Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat Mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran 2014

No. Aduan	Tgl Aduan	JENIS ADUAN	Pengadu / Pelapor	Modus Pungli
012/UPA/MCW/VII/2014	1 Juli 2014	Pungli biaya Pendidikan	Rendra Kurniawan Sulistyio	Pungutan Infaq Pendidikan setiap bulan di SMP Ma'arif Janti
013/UPA/MCW/VII/2014	1 Juli 2014	Pungli PPDB	Saniah	Pungutan Sebesar 3,5 Juta untuk SPP dan Seragam di SMK 1 Kota Malang
014/UPA/MCW/VII/2014	2 Juli 2014	Pungli biaya Pendidikan	Bu Piani (Kab. Malang)	Pungutan Sebesar Rp.255.000,- untuk Daftar Ulang dari kelas VIII ke kelas IX & Rp.165.000,- untuk daftar ulang bagi siswa kelas VII ke kelas VIII
015/UPA/MCW/VII/2014	2 Juli 2014	Pungli PPDB	Bu Muinah Kab. Malang	Pungutan untuk Biaya Uang gedung di SD Kucur Dau Kab. Malang
016/UPA/MCW/VII/2014	2 Juli 2014	Pungli biaya Pendidikan	Suprati (Kab. Malang)	Pungutan sebesar Rp.165.000,- untuk Daftar Ulang di SMP NU Ngadi Langkung Kab. Malang
017/UPA/MCW/VII/2014	2 Juli 2014	Pungli PPDB	Listriningsih Panggung Rejo Kab. Malang	Pungutan untuk uang gedung & tarikan untuk Pengambilan Raport siswa di SDN 3

⁵ Umarul faruk, DKK, **Merebut Hak yang Terampas**, Malang Corruption Watc, Malang, 2013, hlm. vii

				Panggung Rejo Kab. Malang
018/UPA/MCW/VII/2014	2 Juli 2014	Pungli PPDB	_____	Pungutan di SDN Mojosari untuk Pembayaran Peralatan/Perlengkapan sekolah, Tabungan wajib untuk Sekolah sebesar Rp. 20.000,-
019/UPA/MCW/VII/2014	3 Juli 2014	Pungli PPDB	Ngatinah	Pihak sekolah SMPN 2 Sukodadi menawarkan kursi bagi siswa yang mau membayar biaya uang gedung Rp.900.000,-, SPP Rp.40.000,-, & uang bangku min. Rp. 300.000,-. bagi siswa yang rendah nilainya

Sumber: Data Hukum Skunder, diolah 2014

B. Peran Serta LSM Malang Corruption Watch Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peranan yang dilakukan oleh MCW sebagai lembaga swadaya masyarakat Tidak hanya melakukan monitoring, insvestigasi dan pengawasan terhadap praktek tindak pidana korupsi saja akan tetapi sebagai lembaga swadaya masyarakat MCW melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan erat dengan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya adalah :⁶

a. Kampanye dan Pendidikan Publik bagi Masyarakat

salah satu upaya yang dilakukan oleh MCW adalah dengan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat guna menekan angka tindak pidana korupsi. Selain itu pendidikan

publik bagi masyarakat memberikan pengetahuan, wawasan akan bahaya, dampak tindak pidana korupsi yang akhirnya menciptakan masyarakat yang beradab, berartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya masyarakat yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Pencarian kasus melalui Pengkajian dan Penerimaan Aduan Kasus Korupsi

selain Melakukan investigasi kepada kasus tindak pidana korupsi yang telah masuk dalam daftar kasus yang ditangani, MCW juga melakukan berbagai macam upaya dalam menemukan dugaan adanya praktek tindak pidana korupsi yaitu dengan inisiatif melakukan kajian-kajian terhadap APBD (anggaran pendapatan daerah) yaitu melakukan kajian terhadap rekening pemerintah daerah yang terdapat kejanggalan, audit BPK (badan pemeriksa keuangan) serta rencana kerja pemerintah daerah.⁷MCW selain melakukan upaya inisiatif kajian guna menemukan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi juga menerima pengaduan dari masyarakat ini dimaksudkan agar timbulnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,

c. Kerjasama MCW dengan Berbagai Instansi Terkait

kerjasama yang dilakukan oleh MCW dalam

⁷ Hasil wawancara dengan AL machi akhmad, Anggota divisi monitoring pelayanan publik dan pengaduan publik MCW, diolah 2014

penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh berbagai instansi dan berbagai macam pihak yaitu :

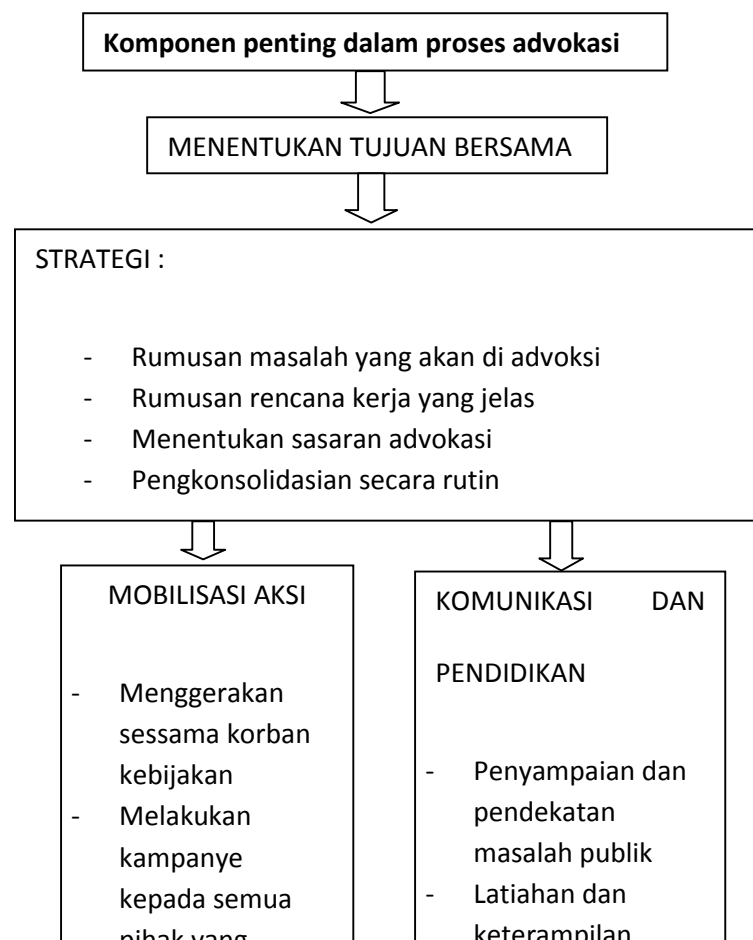
1. Kerjasama MCW dengan Kepolisian
2. Kerjasama MCW dengan Kejaksaan
3. Kerjasama MCW dengan Mahkamah Agung
4. Kerjasama MCW dengan KPK

d. Advokasi

Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh MCW merupakan kegiatan utama yang menjadi prioritas MCW selain kegiatan lainnya dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak MCW untuk menawarkan bantuan advokasi bagi masyarakat ataupun pihak yang merasa dirugikan atas haknya

Bagan 3

Komponen Dalam Advokasi yang Dilakukan oleh MCW



C. Kendala yang Dihadapi Malang Corruption Watch Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Kota Malang

. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat MCW tentunya banyak menghadapi kendala dan hambatan yang di peroleh baik kendala internal maupun kendala eksternal diantaranya adalah;

1. Kurangnya Responsitas Dari Pihak Terkait

Menurut penuturan dari divisi monitoring hukum dan peradilan LSM MCW aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan apabila telah menerima dan menangani suatu kasus tindak pidana korupsi tidak secara langsung dan inisiatif melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus yang telah dilimpahkan MCW kepada kejaksaan maupun kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung suatu kasus tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum lebih banyak menangani kasus yang telah disertai alat bukti dan saksi yang mendukung saja tanpa mengkaji ulang apakah suatu kasus dugaan korupsi tersebut dapat di proses lebih lanjut⁸

2. Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Masih Swadaya

MCW yang merupakan suatu lembaga penggiat anti korupsi yang bebentuk lembaga swadaya masyarakat, oleh karena bentuk

⁸ Hasil wawancara dengan Al Machi Akhmad, Anggota divisi monitoring pelayanan publik dan pengaduan publik MCW, diolah 2014

kelembagaanya yang swadaya tentunya di dalam pendanaan untuk kegiatannya dalam penanggulangan dan pemberantasan juga masih bersifat swadaya dan mandiri dimana tidak ada campur tangan ataupun subsidi dari pemerintah untuk pelaksanaan program kerja dari MCW. Dana yang diperoleh MCW berasal dari pendanaan yang berasal dari dalam MCW sendiri yang telah mempunyai sebuah percetakan buku yang cukup besar sehingga dirasa cukup untuk membiayai pelaksanaan program-program kerja MCW.⁹

3. Tertutupnya akses informasi dan publikasi lembaga public

hambatan dalam mengakses informasi dan dokumen public, adanya manipulasi sejumlah data dalam dokumen publik yang didalamnya merupakan data fiktif dan telah direayasa seolah-oleh benar dan valid juga sangat menghambat proses investigasi, penemuan fakta-fakta juga pengumpulan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi di dalam suatu instansi pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat MCW

4. Ancaman dan Intimidasi dari Berbagai Macam Pihak yang Terlibat dalam Kasus Korupsi

kegiatan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh MCW tentunya melibatkan berbagai macam pihak didalamnya, serta membutuhkan suatu perjuangan yang tidak mudah karena banyaknya oknum-oknum dari pihak yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi yang sedang diinvestigasi oleh MCW

melakukan ancaman, teror dan intimidasi akan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis apabila tidak mau menghentikan proses investigasi terhadap kasus tersebut.

Tindakan persuasif juga sering dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam kedudukannya apabila MCW melakukan proses investigasi yang berkaitan dengan jabatan dan instansi pemerintahan diduga didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karenanya tidak jarang pihak-pihak tersebut menjanjikan bahkan memberikan uang kepada beberapa anggota MCW untuk menghentikan proses investigasi dan pelaporan kepada aparat penegak hukum karena berkaitan dengan jabatan orang-orang tertentu di dalam pemerintahan yang merasa terancam apabila menemukan dugaan kasus tindak pidana korupsi terhadap pejabat atau instansi tersebut

5. Keterbatasan kualitas dan kuantitas anggota MCW

Jumlah anggota MCW apabila dilihat dari segi kuantitas dinilai sudah cukup memadai dengan adanya banyak anggota dalam suatu divisi, namun demikian tugas yang begitu banyak dan pemantauan, pengawasan lembaga pemerintahan masih terbatas mengingat banyaknya lembaga publik yang terindikasi korupsi sangatlah banyak. Selain itu pula wilayah kerja MCW yang mencakup seluruh Malang Raya dirasa sangatlah luas dibandingkan dengan jumlah anggota dari MC. Oleh karenanya dirasa perlu peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas anggota MCW.

D. Upaya Malang Corruption Watch Dalam Menghadapi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Kota Malang

1. Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi

Pendidikan masyarakat anti korupsi dimaksudkan agar pencegahan secara preventif, serta memberikan kesadaran, pengetahuan dan juga peningkatan kemampuan baik secara teoritis dan prakteknya dalam menangani permasalahan korupsi yang ada di sekitar lingkungannya.¹⁰

Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Anggota MCW

Untuk meningkatkan kemampuan serta pengalaman dari anggota internal badan pekerja, MCW juga melakukan pelatihan terkait kajian, analisis, legal opinion, pengorganisasian serta proses pendampingan atau yang biasa dikenal dengan istilah advokasi.¹¹ setiap anggota MCW dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan udahnya dalam insvestigasi dan melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

2. Merangkul Media Masa Guna Membangun Opini Publik

Media masa sebagai bagian dari pada alat dan partner untuk mengkampanyekan kegiatan anti korupsi yang diusung oleh MCW sangatlah berperan penting dalam penangulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain berperan dalam pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat media juga membantu dalam menyoroti kinerja aparat penegak hukum dalam menagani suatu kasus yang telah dilimpahkan oleh MCW. Media juga berperan dalam penyebaran

¹⁰ Wawancara dengan Fatin, Anggota divisi pendidikan publik dan kampaye, diolah 2014

¹¹ Wawancara dengan Akmal Adi Cahya, Ketua divisi Monitoring Hukum dan Peradilan, diolah 2014

informasi perkembangan kasus korupsi yang telah ditangani oleh MCW

3. Membangun Kerjasama Dengan Aparatur Penegak Hukum

a. Kerjasama MCW dengan Kepolisian

kerjasama di bidang penyidikan khususnya yang berada di wilayah Kota Malang, MCW memberikan informasi kepada kepolisian terkait informasi atas dugaan kasus korupsi dan selanjutnya kepolisian akan mengadakan penyidikan dan penyelidikan terkait laoran tersebut.

b. Kerjasama MCW dengan Kejaksaan

kerjasama di bidang kewenangan penyidikan dan penutupan khususnya di kejaksaan atas informasi dan pelaporan kasus yang dilaporkan oleh MCW.

c. Kerjasama MCW dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

MCW merupakan LSM yang beroperasi di daerah Malang memberikan informasi atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayah kerja MCW kepada KPK.

4. Membangun kerjasama Dengan Jaringan Pegiat Anti Korupsi

Lainya

Terdapat beberapa lembaga atau jaringan yang bekerjasama dengan MCW guna meningkatkan kemampuan dan daya dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan fakultas hukum seluruh Jawa Timur, lembaga bantuan hukum, Praktisi hukum serta akademisi untuk melakukan kajian dan analisis terkait kasus yang dirasa kurang mampu untuk ditangani sendiri. Selain itu MCW juga melakukan kerjasama dengan ICW (Indonesia

Corruption Watch) untuk melakukan proses analisa lanjutan terhadap hasil analisa awal yang telah dilakukan oleh MCW.¹²

D. Penuutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah :

1. Peran serta yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat MCW adalah dengan penanganan 14 kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir, penerimaan aduan dari masyarakat, melakukan kampanye dan pendidikan publik bagi masyarakat, serta pencarian kasus tindak pidana korupsi baik melalui inisiatif pengkajian dan pelaporan yang diterima masyarakat.
2. Kendala internal yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat MCW adalah pendanaan lembaga swadaya masyarakat MCW yang masih bersifat swadaya karena MCW merupakan lembaga yang independent yang terlepas dari campur tangan pemerintah, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas anggota MCW yang tidak sebanding dengan besarnya wilayah yang ditangani. Kendala eksternal yang dihadapi oleh MCW adalah kurangnya responsitas pihak terkait penaggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga sering kali menghambat penanganan kasus, tertutupnya akses informasi dan publikasi lembaga publik yang menyulitkan MCW untuk proses infestigasi, dan juga adanya

ancaman dan intimidasi dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam korupsi.

3. Upaya preventif yang dilakukan MCW dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterampilan anggota MCW, membangun kerjasama dengan jaringan penggiat anti korupsi lainnya serta melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi publik. Upaya represif yang dilakukan oleh MCW dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan investigasi kasus dugaan korupsi serta membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum dan merangkul media massa sebagai media untuk membangun opini publik dalam penanganan suatu kasus.

2. Saran

1. Perlu banyak diadakan penyuluhan dan pendidikan publik bagi masyarakat akan penanganan kasus tindak pidana korupsi serta dibutuhkan sosialisasi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta sosialisai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Perlunya dukungan sarana prasarana yang mendukung MCW dalam penaggulangan tindak pidana korupsi serta penambahan anggota baik secara kualitas dan kuantitasnya
3. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antara lembaga swadaya masyarakat dan aparaturn penegakan hukum dalam penaggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 4.

E. Daftar pustaka

BUKU :

Evi hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Gravika, Jakarta, 2005

Chaerudin, syaiful ahmad dinar, syarif fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, Bandung, 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, **Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia**, Badan Penerbit Undip, Semarang

Umarul faruk, DKK, **Merebut Hak yang Terampas**, Malang Corruption Watc, Malang, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia